

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Anand, Ghansham. 2014. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Budiono, Herlin. 2015. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia (Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Budiono, Herlien. 2017. *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Chandra, Syafruddin. 2005. *Sertifikat Kepemilikan Hak atas Tanah (Persyaratan Permohonan di Kantor Pertanahan)*. Jakarta: Grasindo.
- Hadiwiyono, Surhayono M. 2020. *Hukum Pertanahan di Indonesia (Progresifitas Sistem Publikasi Positif Terbatas dalam Pendaftaran Tanah di Indonesia)*. Malang: Inteligensia Media.
- Harsono, Boedi. 2008. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- HS, Salim. 2015. *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Isnaeni, Moch. 2014. *Seberkas Diaroma Hukum Kontrak*. Surabaya: PT. Revka Petra Media.
- Kelsen, Hans. 2012. *Teori Hans Kelsen Tentang hukum (terjemahan Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at)*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Moechtar, Oemar. 2017. *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Santoso, Urip. 2017. *Pejabat Pembuat Akta Tanah (Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta)*. Jakarta: Kencana
- Sihombing, B.F. 2019. *Sistem Hukum PPAT dalam Hukum Tanah Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Sjaifurrachman. 2011. *Aspek pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: CV. Mandar maju.

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutedi, Adria. 2018. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pandoman, Agus. 2017. *Teknik Pembuatan Akta-Akta Notaris*. Yogyakarta: Raga Utama Kreasi.
- Pasek Diantha, I Made. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada Media group.
- Purnamasari, Irma Devita. 2010. *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Mengatasi Masalah Hukum Pertanahan*. Bandung: Penerbit Kaifa
- Tehupeiory, Aartjie. 2012. *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Jakarta: Penebar Swadaya Grup.
- Thamrin, Husni. 2011. *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Utomo, Hatta Isnaini Wahyu. 2020. *Memahami Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Jakarta: Kencana.
- Waksito dan Hadi Arnowo. 2019. *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

## **B. Jurnal**

- Ermasyanti. 2012. *Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Proses Jual Beli Tanah*. Keadilan Progresif, Vol 3 No.1.
- Korompis, Syendy. 2018. *Pengaturan Hukum tentang Pendaftaran Tanah menjadi Hak Milik Menurut Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997*. Vol. IV No. 3.
- Kezia, Maria. 2018. *Tanggung jawab dan akibat hukum pejabat pembuat akta tanah terhadap pembuatan akta jual beli berdasarkan kuasa mutlak*. Tesis. Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia.
- Purwanti, Sri. 2016. *Akibat Hukum dari Pembuatan Akta Jual Beli Tanah yang Tidak sesuai dengan Tata Cara Pembuatan Akta PPAT*. Jurnal Repertorium. Vol. III Nomor 2.

- Safriadi, Bahirah. 2020. *Pembuatan Akta Jual Beli Tanah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan Tidak Hadirnya Para Pihak*. Skripsi. Fakultas syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Susanti, Fitri. 2008. *Praktek Perjanjian Pengikatan Jual beli Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Notaris di Jakarta Timur*. Thesis. Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
- Syazali, Emir Adzan. 2018. *Kepastian Hukum Akta Jual Beli Tanah Pada Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan*. Jurnal Yuridis Unaja. Vol.1 Nomor 2.
- Utami, Pipit Saputri. 2019. *Pertanggungjawaban Notaris/PPAT terhadap Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang BPHTB-nya belum Dibayar*. Jurnal wawasan Yuridika. Vol. 3 Nomor 2.
- Wardani, Dian Eka Nurul, H. Gatot Dwi Hendro Wibowo dan Sahnun. 2017. *Implikasi hukum blanko akta PPAT setelah dikeluarkannya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 32 Nomor 2.
- Wirahutama, Danang, Widodo Tresno Novianto, Noor Saptanti. 2018. *Kecakapan Hukum dan Legalitas Tanda Tangan Seorang Terpidana Dalam Menandatangani Akta Otentik*. Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47 Nomor 2.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun

1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan beserta Perubahannya

Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29- 30 Mei 2015.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

#### **D. Website**

Latumeten, Pieter.2018. "Code of ethics, code of conduct & sense of ethics sebagai sistem etika dan pola perilaku Notaris". Diakses pada 28 Desember 2020. <https://ikanotariatui.com/kode-etik-notaris/>

Romadhoni, Helmi. 2020. "Tugas dan Wewenang Notaris-PPAT". Diakses pada tanggal 27 desember 2020. <https://www.inanews.co.id/2020/05/tugas-dan-wewenang-notaris-ppat/>

Anam, Saiful. 2017. "Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach) dalam Penelitian Hukum". Diakses pada 16 Februari 2021. <https://www.saplauw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>

#### **E. Sumber-Sumber Lainnya**

Wawancara